

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam Tindak Pidana

A.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah proses atau suatu tindakan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa benar-benar terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim dalam persidangan untuk menjatuhkan hukuma kepada Terdakwa.¹⁰

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses yang dilakukan di dalam persidangan atau dihadapan hakim untuk mencari kebenaran mataeriil..

- b. M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”¹¹

¹⁰ R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm.1.

¹¹ M.Yahya Harahap. 2008. *Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 27 9.

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembuktian yang dilakukan didalam persidangan harus sesuai dengan aturan hukum atau dalil-dalil hukum yang berlaku di indonesia.

c. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a) Dalam kata logis, pembuktian adalah suatu hal yang harus mutlak dilakukan di pengadilan;
- b) Dalam arti konvensional, yaitu memberikan nilai yang sesuai dengan undang-undangan yang berlaku; dan
- c) Dalam arti yuridis, adalah memberikan nilai yang sesuai dengan undang-undang sehingga hakim menjadikan dasar sebagai putusan.¹²

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa pembuktian merupakan proses yang dilakukan oleh Hakim di dalam persidangan untuk membuat keyakinan hakim atau memperkuat keyakinan hakim bahwa benar-benar terjadi suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi, sehingga hakim perlu membuktikan semuanya di dalam persidangan tersebut.

Maksud penulis memasukkannya di dalam tinjauan ini yaitu untuk mengetahui secara teori mengenai pembuktian itu apa, sehingga penulis dalam memahami secara betul dan jelas untuk dilanjutkan dalam pembahasan nantinya.

¹² Anshoruddin. Op.Cit. Hal. 27-28

A.2. Jenis Teori Pembuktian dalam KUHAP

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*, Waluyadi mengatakan bahwa ada beberapa teori yang ada antara lain yaitu:

1. *Conviction-in Time*, adalah teori yang mengemukakan bahwa penilaian atas suatu peristiwa hukum yang terjadi sepenuhnya dilimpahkan kepada keyakinan hakim, sehingga keyakinan hakim disini menjadi hal yang mutlak atau benar-benar sepenuhnya diserahkan kepada hakim;
2. *Conviiction - Raissonnee*, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting, namun tidak sepenuhnya, dalam artian bahwa penilaian suatu peristiwa hukum dengan keyakinan hakim dan didukung dengan alasan-asalan yang logis atau dapat dijelaskan oleh hakim tersebut.¹³
3. Pembuktian Posistif, yaitu pembuktian yang seenuhnya dinilai dengan alat bukti yang sah dan ada dalam peristiwa tersebut, keyaninan hakim disini tidak mempengaruhi suatu putusan, namun berlandsakan kepada alat bukti sepenuhnya.
4. Pembuktian secara Negatif, yaitu adalah pembuktian yang penilaiannya di dasarkan dengan alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim, sehingga kedua hal tersebut seimbang dan tidak ada yang mendominasi, sistem negatif ini diterapkan dalam sistesm pembuktian di Indonesia.¹⁴

Dari pembahasan di atas bahaw sistem negatif lah yang ssangat sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indoensia, hal ini serupa dalam Pasal 183 KUHAP sehingga dalam teori ini lebih menekankan atau menitik beratkan terhadap barang alat-alat bukti yang sudah di peroleh dan sah menurut Undang-undang sehingga diikuti dengan keyakinan Hakim untuk memutuskan.

¹³ Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung Mandar Maju. Hlm. 39

¹⁴ Waluyadi. Op.Cit. Hal. 39

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :¹⁵

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ;
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori yang sesuai dengan Undang-undang di Indonesia yaitu sistem pembuktian negatif, hal tersebut didukung dengan pasal 183 KUHAP, sehingga penilaian pembuktian harus sesuai dengan alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim bahwa benar-benar terjadi suatu peristiwa hukum.

A.3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah suatu proses yang harus dilaukan di dalam persidangan sehingg dengan adanya pembuktian di dalam persidangan hakim dapat menjatuhkan suatu hukum dalam perkara yang ada apakah benar terjadi pelanggaran hukum ataupun tidak.¹⁶

Dalam pembuktian sistem negatif, berlandaskan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : ” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan

¹⁵M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hal. 2

¹⁶ Adhami Chazawi, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Alumni. Hl m. 24

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila telah mendapatkan dua alat bukti sehingga membuat keyakinan hakim bahwa benar-benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut sama dengan isi dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Penjelasan sistem pembuktian diatas untuk mendukung tujuan dari Hukum Acara Pidana di Indonesia, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran-kebenaran materiil di dalam persidangan. Sehingga untuk tercapainya atau memperoleh kebenaran materiil maka dibuthkannya alat bukti yang sah sekurang-kurangnya 2 alatbukti dan didukung dengan keyakinan hakim yang di peroleh. *Verbalisan* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan, maka menurut penulis merasa sangat perlu di jelaskan untuk membantu penulis melakukan kajianlebih dari saksi *verbalisan* tersebut.

A.4. Beban Pembuktian

dalam sistem hukum pembuktian tersebut berhubungan dengan eksistensi terhadap asas-asas beban pembuktian di Indonesia. Apabila

dilihat dalam ilmu pengetahuan hukum yang ada di Indonesia antara lain yaitu, beban pembuktian pada penuntut umum, beban pembuktian pada terdakwa, dan beban pembuktian berimbang.¹⁷

- a. Beban pembuktian penuntut umum
Teori ini membebankan pembuktian kepada penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum sepenuhnya, jadi seperti alat bukti, saksi dan lain-lainnya dihadirkan dalam persidangan atas permintaan oleh penuntut umum untuk dilakukannya pembuktian dalam persidangan tersebut.
- b. Beban pembuktian terdakwa
Dalam teori ini mengatakan bahwa beban pembuktian sepenuhnya di ajukan oleh terdakwa, biasanya pembuktian ini dilakukan untuk meringankan atau membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum. tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya maka oleh pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah. Teori beban pembuktian ini dinamakan dengan teori beban pembuktian terbalik.
- c. Beban pembuktian berimbang
Dalam teori ini pembuktian dilakukan bersama-sama antara penuntut umum dan terdakwa atau advokat/pengacara dari terdakwa.

Berdasarkan pembahasan diatas, menurut penulis beban pembuktian yang berlaku di Indonesia secara praktik lebih mengarah kepada beban pembuktian pada penuntut umum saja, karena dalam persidangan beban pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam praktiknya lebih mendominasi di dalam persidangan tersebut.

A.5. Penilaian Kesaksian

Di dalam pasal 185 KUHP, telah ditentukan mengenai penilaian terhadap alat bukti saksi yang harus dilakukan oleh hakim, yakni Ayat:

¹⁷ Djoko Sumaryanto, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta. Prestasi Pustaka. Hlm. 89-90.

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain, Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
5. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat dipengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
6. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Namun menurut pendapat penulis hal yang terpenting dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksi adalah di sini hakim harus benar-benar menilai secara bebas, jujur dan obyektif serta diharapkan agar hakim bisa membedakannya atas keberadaan keterangan palsu yang diberikan oleh seorang saksi, seperti yang diatur dalam pasal 174 KUHP.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita dalam bukunya yaitu hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana menyebutkan bahwa penilaian dari keterangan saksi antara lain yaitu: ¹⁸

- a. Penilaian yang diberikan oleh saksi bersifat bebas, yaitu hakim boleh menerima ataupun tidak menerima isi dari keterangan tersebut apabila hakim tidak yakin dengan didukung dengan alat bukti yang ada.
- b. Hakim harus bersifat objektif, jujur serta tidak memihak untuk memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:
 - Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
 - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
 - Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dalam hal ini untuk penilaian kesaksian, seorang hakim harus bebas dan objektif atas penilaian kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam persidangan, sehingga mewajibkan hakim memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional serta berpengalaman dalam bidang hukum.

¹⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. Op.Cit. Hal.45-46.

B. Tinjauan Umum Alat Bukti

B.1. Pengertian Alat Bukti

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat bukti adalah hal atau benda yang digunakan sebagai bukti dalam suatu perkara. Sedangkan bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata dan tanda, serta hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.¹⁹

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang alat bukti antara lain sebagai berikut:

- a. W.J.S. Poerwadarminta
 - a) Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya)
 - b) Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan atau sebagainya)
 - c) Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.²⁰

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa W.J.S. Poerwadarminta menjadikan alat bukti sebagai peristiwa atau kejadian yang dikategorikan kejahatan atau sebagainya sehingga selanjutnya dapat dijadikan alat pembuktian atas peristiwa hukum yang sedang terjadi.

- b. Hari Sasangka

“Alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan non barang) yang ditetapkan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk

¹⁹ KBBI Daring. *Pengertian alat bukti dan bukti*. kbbi.kemdikbud.go.id. tanggal Acces 28 April 2018 jam 16.19 wib.

²⁰ Wjs. Poerwadarminta. 1961. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 540

memperkuat suatu dakwaan, tuntutan, dan gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan dan gugatan atau dengan kata lain alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungan atau keterkaitan dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim”.²¹

Sedangkan dari pendapat Hari Sasangka diatas dapat diketahui bahwa alat bukti merupakan barang atau non barang yang telah di atur dalam peraturan Perundang-undangan untuk memperkuat kebenaran adanya suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Berdasarkan beberapa uraian definisi diatas disimpulkan bahwa alat bukti merupakan bukti yang dapat membuktikan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi yang berupa barang maupun non barang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang untuk dipergunakan memperkuat dakwaan, tuntutan maupun gugatan yang telah dilakukan oleh terdakwa atau pelaku tindak pidana. Apabila kita melihat dalam persidangan, alat bukti sangat dibutuhkan dan berperan penting untuk memperkuat keyakinan hakim dalam suatu perkara yang sedang terjadi. Alat bukti itu sendiri adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan tindak pidana yang sedang terjadi. Sehingga dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita. Op.Cit. Hal. 7

B.2. Macam-macam Alat Bukti dalam KUHAP

Sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis di atas mengenai sistem pembuktian apa saja yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai mana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP, maka dalam sub bab ini akan penulis jelaskan tentang pengaturan alat bukti dalam KUHAP.

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menjelaskan alat bukti apa saja yang sah atau dapat dipergunakan dalam pembuktian di pengadilan. Adapun pendapat dari berbagai ahli antara lain yaitu;

a) Para ahli Hari Sasangka dan Lily Rosita mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”²²

b) Dalam bukunya Lilik Mulyadi menjelaskan yaitu:

“Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.”

Seperti sebagaimana para ahli jelaskan di atas bawa di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP , adalah sebagai berikut: ²³

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

²²Hari Sasangka dan Lily Rosita. Op.Cit. Hal. 11.

²³ Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bawah sesuai dengan pasal 184 KUHAP telah dijelaskan alat bukti yang sah dan diperbolehkan oleh Undang-undang. Adapun macam-macam alat bukti yang sah tersebut adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari urutan pada Pasal 184 KUHAP penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan saksi. Sehingga saksi merupakan alat bukti yang kuat untuk menjelaskan terjadinya satu peristiwa tindak pidana yang sedang terjadi.

Dimasukkannya keterangan macam-macam alat bukti dalam KUHAP dalam tinjauan pustaka ini adalah untuk mengkaji dalam pembahasan pada penelitian ini. Yang dalam hal ini macam macam alat bukti tersebut digunakan hakim untuk mencari kebenaran atas terjadinya peristiwa hukum atau perkara hukum yang terjadi. Penulis meninjau bahwa macam-macam alat bukti ini apakah saksi *verbalisa* termasuk juga dalam pasal 184 KUHAP tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Saksi

C.1. Pengertian Saksi

Dalam pengertian yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di atur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. saksi yaitu “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Apabila dilihat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu “Saksi yaitu orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang hal-hal yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri atau ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana.”

Dari pengertian kesaksian diatas yang ada, masih banyak yang mengatakan bahwa saksi tersebut tidak lah sesuai seperti penjelasan diatas, dapat penulis artikan bahwa innti dari pengertian saksi yaitu adanya syarat-syarat yang berlaku antara lain yaitu:

- a) Seseorang yang melihat secara langsung kejadian atau peristiwa hukum yang ada.
- b) Seseorang yang mendengar secara langsung kejadian atau peristiwa tersebut.
- c) Seseorang yang mengalami sendiri, atau yang menjadi korban dari peristiwa tersebut.

Dalam hal tersebut, saksi haruslah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi saksi di dalam persidangan antara lain yaitu:

1) Syarat formal

Dalam syarat ini saksi haruslah disumpah terlebih dahulu untuk memberikan keterangan di dalam persidangan sebagai mana telah tertuang dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa saksi harus mengucapkan sumpah atau janji untuk memberikan keterangannya di hadapan hakim atau di dalam persidangan, dengan cara antara lain yaitu : ²⁴

- a) Dilakukan dengan kepercayaan agama yang dianut.
- b) Isi dari sumpah tersebut antara lain yaitu bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka di Pasal 161 ayat (2) mengatakan bahwa pengucapan sumpah adalah syarat yang mutlak: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” sehingga akan memperahuri keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana yang sedang terjadi.

2) Syarat materil

Dalam syarat ini dapat kita ketahui yaitu Pasal 1 angka 27

Jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam hal ini tidak semua keterangan saksi dapat dijadikan bukti, yang dapat dijadikan saksi

²⁴ M.Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm.286.

yaitu adalah saksi yang melihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi yang alami sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pada pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu setiap keterangan saksi di luar apa yang didengar sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan yang di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

Dimasukkannya pengertian saksi serta syarat formil dan materiil dalam tinjauan pustaka ini adalah ditujukan dengan maksud memberikan gambaran umum mengenai saksi serta syarat-syarat formil dan materiil sehingga gambaran tersebut akan dikaji dalam pembahasan pada penelitian ini. Dan Penulis perlu mengetahui dari pengertian saksi dan syarat-syarat formil serta materiil sebelum membahas dalam penelitian ini.

C.2. Macam-macam Saksi

Sebagaimana KUHAP jelaskan bahwa ada beberapa macam saksi,

Adapun macam-macam saksi dalam KUHAP yaitu antara lain: ²⁵

²⁵ H.P.Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian; Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni. Hal. 87.

a) Saksi *A Charge*

Saksi *A Charge* adalah saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi ini biasanya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangan di hadapan hakim atau dalam pengadilan untuk memperkuat bahwa benar terdakwa lah yang melakukan suatu tindak pidana yang sedang terjadi.

b) Saksi *A de Charge* (meringankan terdakwa)

Pengertian saksi *A de Charge* merupakan saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh pengacara atau pihak Terdakwa untuk meringankan atau membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. saksi ini merupakan saksi yang meringankan terdakwa dari segala tuntutan dari JPU”.

c) Saksi Ahli

Saksi ahli adalah saksi yang dihadirkan dalam persidangan guna memberikan keterangan berdasarkan keahlian khususnya dalam bidang yang dia ketahui maupun di kuasai. Hal ini tertera dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP.

d) Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang diberikan wewenang untuk memberikan kesaksiannya dalam pengadilan untuk memberikan keterangan kesaksian atas kasus yang sama namun berbeda berkas penuntutan.

e) *Saksi Verbalisan*

Saksi Verbalisan dalam persidangan yaitu saksi yang diambil dari seorang yang memiliki kewenangan dalam menyusun proses Verbal, sehingga dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya atas proses Verbal tersebut dengan terdakwa, di hadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang di butuhkan oleh Hakim.

C.3. Saksi *Verbalisan*

Istilah saksi *Verbalisan* ini tidak terdapat definisi otentik dalam KUHAP. Adapun beberapa pendapat para ahli antara lain yaitu:

- a) Shinta Ayu Purnamawati berpendapat bahwa Saksi *verbalisan* merupakan orang yang secara langsung melihat kejadian tindak pidana atau peristiwa Hukum yang sedang terjadi, namun keterangan tersebut tidak di limpahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga apabila Hakim perlu keterangan saksi tersebut maka dihadirkan dalam persidangan.²⁶

Dari pendapat tersebut bahwa Hal ini terjadi karena pada saat pelimpahan berkas dari kepolisian ke jaksa, Hakim menemukan bahwa ada saksi yang melihat kejadian tersebut secara langsung namun tidak di cantumkan dalam Berkas Perkara yang ada. Jadi saksi *verbalisan* bisa jadi semua orang yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana yang terjadi.

²⁶ Wawancara dengan Shinta Ayu Purnamawati. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 26 Desember 2018.

b) M. Yahya Harahap

“Saksi *Verbalisan* merupakan orang yang biasanya dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan secara lisan, dimana saksi *Verbalisan* merupakan saksi orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan verbal yang menjadi saksi karena Terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan, sehingga dari situlah diperlukan keterangan dari saksi *Verbalisan* tersebut”.²⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa M. Yahya Harahap pada pandangannya tentang saksi *verbalisan* adalah saksi yang di ajukan dalam persidangan perkara pidana, dimana saksi tersebut merupakan orang yang dapat memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialami sendiri atau petugas yang melakukan atau membuat Berita Acara Pidana sehingga diminta keterangannya di hadapan hakim atas kebenaran tersebut.

c) Hari Sasangka berpendapat bawa Saksi *verbalisan* adalah orang yang memiliki kewajiban untuk melakukan proses verbal kepada semua pihak yang ada dalam perkara yang sedang terjadi.²⁸

Dari pendapat diatas bahwa saksi *verbalisan* tersebut dihadirkan untuk memperkuat keterangan yang telah di lakukan selama proses verbal, sehingga daapat membantu keyakinan hakim untuk menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa.

²⁷ M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Bandin., Kasasi dan Peninjauan Kembali: Ed. 2 Cet I.*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 273.

²⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.* Bandung: Mandar Maju. Hal. 49.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa saksi *verbalisan* adalah orang yang di ajukan dalam persidangan perkara pidana, dimana saksi tersebut merupakan orang yang dapat memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialami sendiri atau petugas yang melakukan atau membuat Berita Acara Pidana sehingga diminta keterangannya di muka hakim atas kebenaran tersebut.

Verbalisan dikenal pada jamannya HIR, setelah KUHAP barulah dikenal sebagai orang yang memiliki tugas untuk melakukan proses verbal. Secara istilah *Verbalisan* adalah “Nama yang diberikan kepada petugas untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara, sehingga di hadirkan dalam persidangan dikarenakan terdakwa mencabut semua isi BAP yang telah di buat dengan aparat yan berwenang yaitu pihak kepolisian.”²⁹

Dalam prakteknya saksi *verbalisan* dihadirkan dalam persidangan apabila pihak terdakwa menyangkal atau mencabut semua isi dari BAP yang telah dibuat karena beralasan bahwa BAP tersebut di susun di bawah tekanan dari pihak aparat penegak hukum, oleh sebab itulah saksi *verbalisan* dihadirkan guna melakukan crosschek atau pemeriksaan di pengadilan atas penyusunan BAP yang telah dibuat tersbut dari pihak penyidik kepolisian.³⁰

²⁹ *Ensiklopedia Indonesia Jilid 5*, 1984, Penerbit: Ichtiar Baru-van Hoeve dan Elseviere Publishing Project, Jakarta, Hal. 381.

³⁰ Lilik Mulyadi. 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 182

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa saksi *verbalisan* masih belum dijelaskan secara emplitis/khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun saksi *verbalisan* lebih lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik persidangan tindak pidana. *Verbalisan* sendiri ada pada saat *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Penulis merasa sangat perlu menjelaskan mengenai saksi *verbalisan* ini di dalam Bab II ini karena menurut penulis sebelum masuk kedalam pembahasan, kita harus mengetahui pengertian itu sendiri saksi *verbalisan* yang ada dalam teori dan dalam praktek yang sering di hadirkan dalam persidangan, sehingga sangat membantu penulis nantinya di dalam melakukan pembahasan di Bab III.

C.3.1. Keterangan Saksi *Verbalisan*

Pada prinsip yang ada saksi *verbalisan* di hadirkan dalam persidangan dikarenakan adanya penyangkalan atas isi BAP yang telah dibuat, sehingga keterangan saksi *verbalisan* ini sangat diperlukan dalam pengadilan guna untuk dilakukannya crosscek atas penyangkalan dari terdakwa tersebut, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan untuk memutuskan perkara pidana tersebut.

M. Yahya Harahap berpandangan bahwa :

“kebebasan memberi keterangan di sidang pengadilan bagi saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Apalagi jika keterangannya di sidang pengadilan secara diametral bertentangan dan berbeda dengan yang diterangkan dalam berita

acara penyidikan, hakim harus meminta penjelasan dan alasan saksi tentang hal tersebut”.³¹

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa menurut penulis dalam memberikan keterangan di persidangan seseorang haruslah bebas dari segala hal seperti halnya tanpa terikat dengan adanya jabatan dan yang lainnya, sehingga seorang saksi yang bebas memberikan keterangannya sesuai apa yang dialaminya, dan dilihatnya secara langsung. Sehingga keterangan tersebut dapat memiliki kekuatan dan dapat menyakinkan hakim dalam memberikan keputusan dalam persidangan.

Kebebasan pemberian keterangan dari saksi tidak memperngaruhi isi dari keterangan tersebut, asalkan isi dari keterangan tersebut tidak memuat keterangan palsu sebagaimana telah dilarang oleh KUHAP untuk memberikan keterangan palsu di dalam persidangan. Kebebasan yang dimaksud adalah seorang saksi bebas memberikan keterangannya dalam persidangan secara Objektif, jujur dan tidak terikat dari pihak maupun jabatan yang dia tanggung jawabkan, sehingga akan menghasilkan keterangan yang netral tanpa ada paksaan dari pihak manapun maupun dari jabatan yang dia emban³²

Arti bebas menurut para ahli M. Yahyah Harahap mengatakan dalam bukunya yaitu:³³

- a. Tanpa pengaruh dan paksaan penekanan dari pihak manapun.

³¹ M. Yahya Harahap, Op.Cit. Hal. 184

³² M. Yahya Harahap. Op.Cit. Hal. 184

³³ Ibid. Hal 185

- b. Pertanyaan yang diajukan kepadanya harus dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti olehnya, agar jawaban yang diberikan benar benar merupakan jawaban yang keluar dari kesadaran nuraninya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasannya.
- c. Dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi, yaitu keterangan yang tidak pernah dinyatakan saksi, tetapi oleh hakim atau penuntut umum dianggap seolah-olah pernah dinyatakan saksi. Pertanyaan yang menjerat seperti ini, melanggar kebebasan saksi memberikan keterangan.

Berdasarkan penjelasan dari M. Yahya Harahap, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa seorang saksi dalam memberikan keterangannya di dalam persidangan harus tanpa paksaan dari pihak manapun, hal ini guna mendapatkan keterangan yang netral di hadapan hakim. Dan juga keterangan kesaksian tersebut tidak boleh memberikan pertanyaan yang dapat dikatakan menjebak atau memaksa saksi untuk mengaku sebagaimana tidak pernah dinyatakan oleh saksi tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 163 KUHAP, yaitu memberi pedoman kepada hakim tentang bagaimana tata cara penertiban masalah ketidaksamaan keterangan yang di katakan oleh saksi tersbut. Jika dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, seorang saksi memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan dalam berita acara penyidikan, tata cara yang dapat ditempuh hakim yaitu:

- a) Mengingatkan bahwa keterangan dari saksi tersebut berbeda dengan apa yang tertulis di dalam BAP maupun dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya yang telah dihadirkan dalam persidangan dan telah dimintai keterangannya terlebih dahulu. Hakim dilarang untuk berdiam diri, hakim wajib

menanyakan atau mengingatkan kembali kepada saksi untuk mengingat peristiwa hukum yang telah terjadi.

- b) Apabila hakim telah mengingatkannya namun masih berbeda, maka hakim akan meminta keterangan lagi kepada saksi yang lainnya guna untuk mendapatkan keterangan yang benar dan netral.
- c) Setelah itu semua keterangan yang telah di berikan dalam persidangan di catat dalam berita pemeriksaan persidangan.

Dari pemaparan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa keterangan yang berbeda dengan isi BAP dalam praktiknya sangat sering terjadi, Oleh karena itu diperlukannya keterangan dari saksi *Verbalisant* (penyidik) dalam perkara tersebut. Namun penggunaan saksi *Verbalisant* dalam pemeriksaan di persidangan tidak diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar atau pedoman dalam acara peradilan tindak pidana di Indonesia.

Tinjauan pustaka tentang saksi *verbalisan* yang dijelaskan lebih rinci dalam Bab II agar penulis memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai keterangan saksi *verbalisan* untuk mengkaji dalam pembahasan pada inti penelitian ini. Yang dalam hal ini keterangan saksi *verbalisan* sangat dibutuhkan apabila Terdakwa menyangkal keterangannya di dalam persidangan, sehingga sangat penting di hadirkan dalam persidangan untuk menyakini keyakinan Hakim.